

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Amin, S. N. A. M. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Deepublish Digital.
- Arto, A. M. (2017). *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*. Prenamedia Group.
- Az, L. S. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komperhensif Teori dan Perkembangannya*. Penebar Media Pustaka.
- Badruzaman, M. D. (2023). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*. Deepublish Digital.
- Djulaeka, & Rahayu, D. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana.
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kharisma Putra Utama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2004). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. RajaGrafindo Persada.
- Munir, M., & Jusmadi, R. (2019). *Buku Ajar Praktek Peradilan Perdata*. Scopindo Media Pustaka.
- Muskibah. (2022). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Deepublish Digital.
- Santoso, A. P. A., Aryono, & Brahma, Y. D. (2021). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PUSTAKABARUPRESS.
- Santoso, U. (2014). *Hukum Perumahan*. Prenamedia Group.

Setiawan, I. K. O. (2015). *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika.

Sumriyah, & Djulaeka. (2022). *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Scopindo Media Pustaka.

Syarifuddin, M. (2020). *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*. Tim Imaji Cipta Karya.

Wahid, A., Rohadi, & Badriyah, S. M. (2022). *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. Deepublish.

Artikel Jurnal:

Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 4(6), 493–502. <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>

Alfiyyah Salsabilah Furi, & Muhammad Raihan Ruddy. (2024). Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Objek Yang Sama Dihubungkan Dengan Tanggung Jawab Notaris. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 37–44. <https://doi.org/10.29313/Jrih.V4i1.4526>

Amangsa, M. A. D. A., & Priyanto, I. M. D. (2019). Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8, 1–18.

Antouw, B. C. (2015). Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Pelaku Usaha Dan Konsumen. *Lex Privatum*, 3(1), 171–179.

- AR., F. P. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Dengan Mekanisme Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PT. Berkat Jaya Land). *Jurist-Diction*, 3(5), 1729. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21976>
- Arimba, C. I., & Mutakin, D. (2025). Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Bandung. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 519–530. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.260>
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/Jpsk.V3i01.1951>
- Dian Apriandini, & Amad Sudiro. (2023). Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) Lunas Yang Belum Mendapatkan Pemecahan Sertipikat Dari Developer Yang Dipailitkan. *Binamulia Hukum*, 12(1), 57–64. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V12i1.435>
- Kurniawati, L. (2018). Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 1–18.
- Manik, W., Sidabalok, J., & Suhardin, Y. (2014). Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Cara Arbitrase di Kota Medan. *Flat Iustitia: Jurnal Hukum*, 5(10), 4–6.
- Mondoringin, J. F. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KuhPerdata. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*.

- Murwanti, S. (2009). Perilaku Konsumen Dalam Memilih Perumahan Pada Perumahan Cipta Laras Bulusur Wonogiri. In *Benefit Jurnal Manajemen Dan Bisnis* (Vol. 13).
- Ratnaningsih, I. D. A. S., & Dewi, P. E. T. (2023). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2(2), 95–102. <https://doi.org/10.35912/Kihan.V2i2.2384>
- Salsabila, A. N., Chumaira, R. Z., & Maharani Musa, N. A. S. M. M. (2023). Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Penerbitan Akta Jual Beli Atas Tanah Bersertifikat Ganda. *UNES Law Review*, 6(1), 2368-2378. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1012>
- Samir, G. (2019). Tanggung Gugat Pengembang Kepada Pembeli Akibat Wanprestasi Terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun. *Perspektif* (Vol. 24).
- Silfiana, B. (2016). Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Sepihak. *Jurnal Hukum Jatiswara*, 319–337.
- Sinaga, niru anita, & Darwis, N. (2015). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Justice Mitra Manajemen*, 7(2), 39–55.
- Syafrina, A., Tampubolon, A., Suhendri, Hasriyanti, N., & Kusuma, H. E. (2018). Preferensi Masyarakat Tentang Lingkungan Perumahan Yang Ingin Ditinggali. *Jurnal Ruas Volume*, 16, 32–45.
- Yudhantaka, L. (2017). Keabsahan Kontrak Jual Beli Rumah Susun Dengan Sistem Pre Project Selling. *Yuridika*, 32(1), 84. <https://doi.org/10.20473/Ydk.V32i1.4793>

Zen Abdullah, M. (2010). Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian. *Lex Specialist*, 20–25.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir:

Hapsari, Galuh, 2018, “*Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Hal Terjadi Sengketa*”, Tesis, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum universitas islam Indonesia Yogyakarta, Yokyakarta.

Sulistyowati, 2006, “*Kendala-Kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha*”, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum perdata;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk Rumah Umum dan Satuan Rumah Susun Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 310);

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).

Makalah:

Makalah Tuada Perdata, “Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur”, *Makalah Rakernas 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia*, jakarta 18-22 September 2011.

Internet:

Januar Fahmi, “Diduga Lakukan Penipuan, Perusahaan *Property* Dilaporkan ke Polisi”, <https://www.rri.co.id/hukum/292833/diduga-lakukan-penipuan-perusahaan-property-dilaporkan-ke-polisi>, diakses pada 27 November 2024

KBBI VI Daring, “Pengembang”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembang>, diakses pada 15 November 2024.

KBBI VI Daring, “Perjanjian”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>, diakses pada 3 November 2024.

M Saiful Rohman, “Lima Tahun, Lahan Produktif Sidoarjo Menyusut 400 Hektare, Ini Kecamatan dengan Lahan Produktif Terkecil”, <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/854946592/lima-tahun-lahan-produktif-sidoarjo-menyusut-400-hektareini-kecamatan-dengan-lahan-produktifterkecil>, diakses pada 25 November 2024

Suparno, “Korban Penipuan Berkedok Perumahan Fiktif di Sidoarjo Harap Uangnya Kembali”, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7485583/korban-penipuan-berkedok-perumahan-fiktif-di-sidoarjo-harap-uangnya-kembali>, diakses pada 27 November 2024.

“5 Alasan Pilih Hunian di Perumahan Lebih Menjanjikan”, <https://kumparan.com/urbanid/5-alasan-pilih-hunian-di-perumahan-lebih-menjanjikan/>, diakses pada 20 November 2024.

“Dirut PT. Araya Berlian Terjerat Kasus Penipuan Perumahan Fiktif”, <https://bisik.id/read/dirut-pt-araya-berlian-terjerat-kasus-penipuan-perumahan-fiktif-1722653355158/>, diakses pada 26 November 2024

Humas Polresta Sidoarjo, “Tipu Gelap Penjualan Rumah, Dirut Pengembang Perumahan di Sidoarjo Ditangkap Polisi”, <https://tribratanews.sidoarjo.jatim.polri.go.id/09/08/2024/tipu-gelap-penjualan-rumah-dirut-pengembang-perumahan-di-sidoarjo-ditangkap-polisi/>, diakses pada 17 Juni 2025.

“Pengertian somasi, dasar hukum, bentuk, cara dan manfaatnya”,
<https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-somasi-dasar-hukum-bentuk-cara-dan-manfaatnya/>, diakses pada 25 Juni 2025.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, “Wajibkah Melakukan Somasi Sebelum Mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan?”,
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/wajibkah-melakukan-somasi-sebelum-mengajukan-gugatan-wanprestasi-ke-pengadilan/>, diakses pada 25 Juni 2025.